

E-GOVERNMENT DALAM SDGS: PENERAPAN WEBSITE SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PEMBANGUNANDI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Novia Kencana¹, Yuni Permatasari²

Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia^{1, 2}

E-mail: noviakencana@fisip.unsri.ac.id¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the sdgs.sumselprov.go.id website as an effort to support the development of e-government in the sustainable development goals (SDGs) point of strong institutions in South Sumatra Province. The type of research used in this study is descriptive qualitative research with a literature review method. This study uses the theory and model of E-Government by Hiller's and ASPA's Five-Stage. This model is a theory created by Hiller to explain the implementation of E-Government in providing web-based public services through five stages or indicators. From the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of e-government has reached the third stage, namely the Interactive Web presence stage (the presence of an interactive website). At this stage, it shows that the implementation of e-government in supporting strong institutional efforts is quite good but not yet optimal.

Keywords: *E-Government, SDGs, Strong Institutions, Sumatera Selatan.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan website sdgs.sumselprov.go.id sebagai upaya mendukung pengembangan e-government dalam sustainable development goals (SDGs) poin kelembagaan yang tangguh (strong institutions) di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode literature review. Penelitian ini menggunakan teori dan model E-Government oleh Hiller's and ASPA's Five-Stage. Model ini merupakan teori yang dibuat oleh Hiller untuk menjelaskan penerapan E-Government dalam menyediakan pelayanan publik berbasis web melalui lima tahapan atau indikator. Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government sudah berada pada tahapan ketiga yaitu tahapan Interactive Web presence (kehadiran website interaktif). Pada tahapan tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam mendukung upaya kelembagaan yang tangguh sudah cukup baik namun belum optimal.

Kata Kunci : *E-Government, SDGs, Kelembagaan Tangguh, Sumatera Selatan.*

PENDAHULUAN

Penerapan E-Government merupakan salah satu jalan untuk dapat mencapai kelembagaan yang tangguh (strong institutions) sesuai dengan tujuan 16 Sustainable Development Goals (atau yang kemudian disingkat menjadi SDGs) yaitu perdamaian (peace), keadilan (justice) dan kelembagaan yang tangguh (strong institutions). SDGs merupakan kerangka global common framework yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2016 hingga tahun 2030 untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. SDGs tentu menjadi komitmen global sekaligus target ambisius dan memerlukan peran pemerintah serta kerjasama dan keterlibatan aktif antara pemerintah, masyarakat dan non-pemerintah.

Dalam melaksanakan kebijakan SDGs, negara dan pemerintah membutuhkan transformasi dalam masyarakat yang lebih kompleks. Inovasi dan teknologi yang digunakan dalam pemerintahan dapat memberikan pendekatan menyeluruh serta memungkinkan keterlibatan lebih banyak aktor dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut dapat memacu keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara (dalam Yamin : 2019). Hal ini tentu sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan atmosfer penerapan e-government untuk mewujudkan tujuan

16 kelembagaan yang tangguh (strong institutions).

Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke 77 dari 197 negara oleh United Nations (UN) E-Government Survei. Survei PBB pada tahun tersebut bertemakan “The Future of Digital Government” dimana survei ini bertujuan sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dibandingkan dua tahun sebelumnya Indonesia mengalami peningkatan secara peringkat. Namun, pada kenyataannya penerapan E-Government di Indonesia masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Menurut Nanik Murwati (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB) menjelaskan bahwa salah satu poin terendah dalam penilaian survei tersebut adalah penguatan infrastruktur telekomunikasi kemudian disusul dengan penguatan aspek tata kelola, layanan dan sumber daya manusia yang masih menjadi persoalan krusial dalam memaksimalkan penerapan e-government di Indonesia. (dalam

menpan.go.id)



Gambar 1. Indonesia menempati posisi ke-77 di UN E-Government survey, 2022.

Sedangkan untuk di Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat pemeringkatan E-Government di Indonesia (PeGI) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia. PeGI ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif serta mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Terdapat lima indikator penilaian yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Berdasarkan survei PeGI oleh Kemkominfo pada tahun 2015 tersebut provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ke 14 di Indonesia. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum melaksanakan Penerapan E-Government secara optimal. Permasalahan utama dalam penerapan

E-Government di Provinsi Sumatera Selatan adalah pengelolaan website untuk pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Hal ini dikarenakan informasi yang diinginkan masyarakat kurang transparan dan tidak lengkap. (dalam ampera.co). Dan persoalan tersebut juga masih menjadi persoalan penerapan E-Government di Provinsi Sumatera Selatan hingga kini. Salah satunya adalah website www.sdgs.sumselprov.go.id yang diluncurkan pada tahun 2023 lalu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil observasi awal di halaman website www.sdgs.sumselprov.go.id tersebut tampak tidak memberikan informasi pengantar tentang apa itu SDGs, tujuan pelaksanaan SDGs di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan ataupun informasi lengkap lainnya. Berdasarkan dari uraian diatas dapat maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut : "Bagaimana penerapan E- Government melalui website sdgs.sumselprov.go.id di Provinsi Sumatera Selatan ?"

KAJIAN PUSTAKA

Konsep E-Government

Rahayu mengartikan E-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara langsung terhadap semua unsur masyarakat yang terdiri dari entitas masyarakat, bisnis dan pemerintah itu

sendiri. Sedangkan menurut Etin Indrayani, E- Government merupakan alat untuk mengubah administrasi publik untuk melakukan inovasi dalam hubungan internal dan eksternal dengan bantuan teknologi elektronik. (dalam Indrayani, 2020). Sedangkan menurut Lim dengan pemerintahan elektronik, pemerintah mencari cara baru “*to effectively create public value through innovative, effective, inclusive, collaborative, open and citizen-oriented service delivery and public policy decision- making leveraging the potential of modern technologies*”(dalam Yamin, 2019). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mendefinisikan E-Government sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Al Gore dan Tony Blair (dalam Indrayani,2020) terdapat beberapa manfaat e-government dalam melaksanakan praktik e-government ini dalam sebuah tatanan pemerintahan, antara lain : Pertama, meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good

corporate governance. serta dapat lebih efisiensi dalam total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan pihak- pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. serta menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat dalam menjawab berbagai perubahan global dan trend yang ada.

Model E-Government : Hiller's and ASPA's Five-Stage

Penerapan e-government memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan publik berbasis web.(Hiller dalam Indrayani, 2020) telah merumuskan suatu model e-government yang terdiri dari lima tahap berikut :

1. Tahapan *Emerging Web Presence* (menghadirkan website instansi). Tahapan ini merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
2. Tahapan *Enhanced Web Presence* (meningkatkan fitur website). Tahapan ini merupakan

tingkatan yang telah mengembangkan fitur-fitur dari website yang telah dibentuk.

3. Tahapan *Interactive Web presence* (kehadiran website interaktif). Pada tahapan ini merupakan tingkatpematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan adanya keterhubungan dengan lembaga lain.
4. Tahapan *Transactional Web Presence* (Kehadiran website sudah pada tahap dilengkapi dengan fitur transaksi). Tahapan tingkat pemantapan yang memuat pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
5. Tahapan *Fully Integrated Web Presence* (Kehadiran website sudah terintegrasi). Pada tahapan ini merupakan tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) yang sudah saling terintegrasi.

Konsep SDGs dan E-Government

SDG'(SuistanableDevelopment Goals) merupakan bentuk agenda global jangka panjang untuk pengoptimalisasian sumber daya yang dimiliki oleh negara anggota guna untuk tujuan pembangunan. Dengan

kata lain pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana manusia dapat hidup sehat, sejahtera, dan harmonis dengan alam sekitarnya, di saat ini dan di masa depan dan memahami negara lain dan PBB sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Menurut Robert Jackson, memahami masyarakat negara bukanlah permasalahan tentang pemakaian model-model ilmu sosial, melainkan suatu permasalahan untuk menjadi akrab dan sedekat mungkin dengan sejarah dan pengalaman praktisi masa lalu hingga hari ini. Oleh karena itu perlu memahami historis mengapa program tersebut muncul ke permukaan.



Gambar 2. E-Gov for Sustainable Development

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode literature review. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan, akurat dan sesuai dengan kapasitas penerapan e-government dalam mewujudkan sds poin ke 16. Sumber data utama dalam penelitian ini

data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui interview kepada narasumber, namun studi kepustakaan atau literature review menurut Crresswell (2014) adalah melakuakn, mencari dan mengorganisir sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan e-government, website www.sdgs.sumsel.go.id serta sumber-sumber referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-goverment dalam SDGS's merupakan jalan baru dari pemerintah yang lebih efektif dalam pembuatan nilai publik baru dengan cara yang inovatif, efektif, inklusif, kolaboratif, keterbukaan terhadap masyarakat, yang berbasis pada pelayanan dan pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada teknologi modern. Adapun tujuan untuk pembangunan keberlanjutan dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui transparansi data, efisiensi dan keefektivitasan, akses dan kualitas pelayanan yang lebih baik, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerinthanan yang berbasis dan konsentasi pada lingkungan.

Hasil dan Pembahasan dilakukan dengan menganalisis penerapan website sdgs.sumsel.go.id dengan menggunakan model *E-Government : Hiller's and ASPA's*

Five-Stage yang juga berkaitan dengan poin ke 16 SDG's yaitu Kelembagaan yang tangguh. Yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tahapan *Emerging Web Presence* (menghadirkan website instansi)

Dalam tahapan ini website sdgs.sumsel.go.id sudah didukung oleh fitur-fitur yang cukup lengkap. Website ini di buat pada tahun 2023 dan dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dari hasil analisis, pada tahapan *emerging web presence* ini juga, BAPPEDA Sumsel membangun website sebagai upaya untuk menyediakan ruang informasi dan komunikasi serta sosialisasi terkait dengan penerapan program SDG's di Sumatera Selatan kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sayangnya dalam website tersebut informasi umum terkait dengan tujuan dan maksud yang secara jelas tidak diuraikan pada beranda atau halaman depan di website tersebut. Di website tersebut hanya menjelaskan tentang tujuan SDG's secara umum sedangkan penjelasan terkait dengan penerapan SDG'S dan data serta informasi di provinsi sumatera selatan belum ada.



Gambar 3. Halaman beranda website

2. Tahapan *Enhanced Web Presence* (meningkatkan fitur website).

Pada tahapan ini akan dianalisis terkait dengan pengembangan fitur-fitur dari website yang telah dibentuk. Pada bagian *header* di website



sdgs.sumsel.go.id tersebut hanya terdapat empat bagian yaitu Beranda, SGD's+, Form+ dan Kontak. Berikut tangkapan layar dari website tersebut:

Gambar 4. *Header* pada beranda

Pada gambar 5 halaman utama pada website menggambarkan keindahan alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan tulisan "Sustainable Development Goals". Bagian beranda juga memberikan informasi terkait dengan tujuan SDG's kemudian judul-judul dari ke 17 poin dari SDG's, tiga buah berita dan artikel yang diupload tahun 2023 serta informasi terkait dengan kontak yang bisa dihubungi dari pihak BAPPEDA Sumsel.

Selain itu terdapat juga fitur form yang seharusnya memberikan informasi dan data- data terkait dengan ke 17 poin SDG's yang sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah diteliti ke 17 bagian form SDG's sebagian besar hanya judul poin nya saja. Dan informasi terkait masing-masing poin SDGs tidak lengkap bahkan tidak ada data sama sekali. Dalam website tersebut tidak ada informasi atau data tentang pelaksanaan dari 17 poin pelaksanaan SDGS's yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan hanya berisikan tabel-tabel yang kosong seperti gambar berikut :



Gambar 5. Form Poin 1 di website.

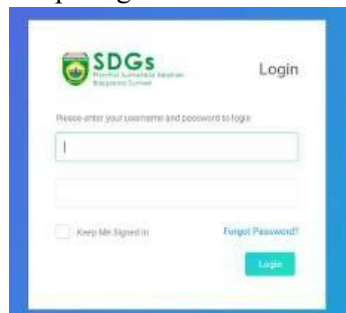
publik yang bersifat interaktif dan adanya keterhubungan dengan masyarakat dan lembaga lain yang membutuhkan informasi terkait dengan penerapan SDG's di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah tangkapan layar dari fitur yang menampilkan untuk masyarakat dapat menghubungi pihak BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 6. Form Poin 16 di website

3. Tahapan *Interactive Web presence* (kehadiran website interaktif)

Pada tahapan ini terapat beberapa fitur atau komponen di dalam website SDG's tersebut yang terdapat interaksi dengan publik dan keterhubungan dengan lembaga lain, dimana pada bagian pojok kanan atas terdapat menu login seperti gambar dibawah ini :



Gambar 7. Menu Login pada website

Tahapan ini merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi



Gambar 8. Tampilan Kontak web

4. Tahapan *Transactional Web Presence* (Kehadiran website

sudah pada tahap dilengkapi dengan fitur transaksi).

Berdasarkan hasil dari analisis penulis, pada tahapan ini website sdgs.sumsel.go.id belum memuat pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

5. Tahapan *Fully Integrated Web Presence* (Kehadiran website sudah terintegrasi).

Dalam model E- Government : Hiller's and ASPA's Five- Stage. Pada tahapan *Fully Integrated Web Presence* merupakan tahapan paling optimal dimana apabila sebuah website telah dibuat dan dikelola dengan maksimal terdapat juga pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) yang sudah saling terintegrasi.

Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa website sdgs.sumsel.go.id belum berada pada tahapan ini dikarenakan belum ada integrasi dengan aplikasi lanjutan yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan publik tentang SDG's di Provinsi Sumatera Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan

bahwa penerapan e-government melalui website www.sdgs.sumsel.co.id sudah berada pada tahapan ketiga yaitu tahapan *Interactive Web presence* (kehadiran website interaktif). Pada tahapan tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam mendukung upaya kelembagaan yang tangguh sudah cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari fitur-fitur website yang belum lengkap, data yang sangat minim. Untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh sesuai dengan poin SDG's tersebut maka sangat perlu dilakukan perbaikan baik dari fitur, isi konten dan keberlanjutan dari program e-government terhadap website tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, John W. .2016. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Indrayani, Etin. 2020. E-Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Solok : Insan Cendekia Mandiri.

Kencana, Novia. 2015. Dinamika Kelembagaan (Suatu Kajian Tentang Proses Penggabungan LOD DIY dan LOS DIY). Tesis : Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

Apandi. 2015. Sumsel Rangking 5 Terendah Pengguna E-Government. diakses pada

<https://www.ampera.co/baca/sumsel-rangking-5-terendah-pengguna-egovernment/>

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2017.

Pemeringkatan e- Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2015. Diakses pada

<https://data.kominfo.go.id/pendata/dataset/pemeringkatan-e-government-indonesia-pegitingkat-provinsi>

Fakhriyah, Riska. Kencana, Novia. Kariem, Muhammad Qur'anul. Efektivitas Penerapan Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengembangan E-Government (Studi Kasus Aplikasi SP4N LAPOR! di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol 7 No.3 Agustus 2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2022. Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survei e- Government PBB. diakses pada

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb>

Mubarok, Abdulloh. Rahmatika, Dien Noviany, dkk. Kajian Hasil Pengujian

- piris Implementasi E-Government di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ultras Vol. 5 Nomor 2 / 2022.
- SDGs Provinsi Sumatera Selatan diakses pada <https://sdgs.sumselprov.go.id/>.
- Yamin, Muhammad. Darmawan, Arief Bakhtiar,dkk. Analisis Open Government dan e-Government di ngembangan E- Government.
- Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs : Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. Jurnal Hubungan Internasional Vol 7 No 2/ Maret 2019
- Dokumen Pemerintah**
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government